

Konsep Negara dalam Filsafat Politik Al-Farabi dan Kontekstualisasinya di Indonesia

Umi Samsiyah

UIN Sunan Kalijaga
umisamsiyah735@gmail.com

Abstract

This article describes the concept of the state promoted by al-Farabi and its contextualization with politics in Indonesia. This discussion is interesting because there are several values in al-Farabi's thought that can be contextualized with the political system in Indonesia. For this reason, this article carries two problem formulations, namely how is the concept of the state promoted by al-Farabi? How is the contextualization of al-Farabi's concept of state with the political system in Indonesia? By using a literature review, this article finds that al-Farabi's thoughts are a combination of his reading of Plato's and Aristotle's thoughts with Islamic religious doctrines. Al-Farabi constructs an ideal state form in which there are good people and leaders who aim to achieve happiness. The Indonesian state in al-Farabi's country classification can be equated with al-Farabi's democratic state, namely there are some similarities with the Pancasila democratic system which is the Indonesian state administration system.

Keywords: State, Political Philosophy, al-Farabi, Indonesian Politics

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang konsep negara yang diusung oleh al-Farabi serta kontekstualisasinya dengan politik di Indonesia. Pembahasan ini menarik karena ada beberapa nilai dalam pemikiran al-Farabi yang dapat dikontekstualisasikan dengan sistem politik di Indonesia. Untuk itu artikel ini mengusung dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep negara yang diusung oleh al-Farabi? Bagaimana kontekstualisasi konsep negara al-Farabi dengan sistem politik di Indonesia? Dengan menggunakan kajian literatur, artikel ini menemukan bahwa pemikiran al-Farabi ini merupakan perpaduan atas pembacaannya terhadap pemikiran Platon dan Aristoteles dengan doktrin-doktrin agama Islam. Al-Farabi mengkonstruksikan bentuk negara yang ideal yang di dalamnya terdapat masyarakat dan pemimpin yang baik yang bertujuan mencapai kebahagiaan. Negara Indonesia dalam klasifikasi negaranya al-Farabi dapat disejajarkan dengan negara demokratisnya al-Farabi, yaitu ada beberapa persamaan dengan sistem demokrasi pancasila yang menjadi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci : Negara, Filsafat Politik, al-Farabi, Politik Indonesia

A. Pendahuluan

Persoalan hubungan Islam dan politik telah menjadi suatu diskursus yang sangat menarik dalam sejarah pemikiran Islam. Hal ini tampak dari banyaknya sarjana-sarjana Muslim dari zaman klasik Islam sampai zaman modern atau kontemporer Islam yang memetakan pemikirannya mengenai hubungan Islam dan politik. Pergumulan para sarjana Muslim dengan demikian menunjukkan bahwa dalam sejarah peradaban Islam, sesungguhnya hubungan antara Islam dan politik sudah ada sejak lama, bahkan sejak agama Islam lahir.¹ Merujuk zaman awal Islam, hubungan Islam dan politik dapat dilihat melalui kepemimpinan Rasulullah Saw., saat menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin agama (Rasul) di Madinah. Kebanyakan dari para sarjana Muslim dalam mengemukakan

¹ Muhammad Arif, "Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (December 22, 2017): 215-36, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-02>.

pemimpin yang ideal, mereka merujuk pada gaya kepemimpinan Rasulullah Saw. Kemudian estafet kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh *Khulafa ar-Rasyidin*. Setelah itu, tampuk kepemimpinan dipegang oleh sistem kerajaan atau kekhalifahan. Dengan demikian menunjukkan bahwa Islam dalam perkembangannya telah diwarnai oleh banyak peristiwa politik, maka tak heran jika banyak pemikiran-pemikiran yang muncul berkaitan dengan hubungan Islam dan politik.

Gagasan hubungan politik dalam Islam sangat penting, politik dipandang sebagai sarana bagi umat Islam untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan mulia, yaitu kebahagiaan dunia-akhirat. Pandangan ini sesuai dengan era kepemimpinan Rasulullah Saw ketika di Madinah. Selain itu, jika melihat puncak peradaban dan kemajuan Islam yang menandai kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam tentu tak bisa melepaskan dari unsur politik atau kekuasaan. Seperti di era Dinasti Abbasiyah yang membuka jalan ilmu pengetahuan bagi dunia Islam sehingga pada masanya banyak ilmuwan-ilmuwan dan intelektual Muslim yang lahir dan bermunculan dengan karya-karya yang sangat monumental. Tentunya politik dalam Islam sangat sentral, sebab untuk bekerja sama demi meraih tujuan mulia (kebahagiaan dunia akhirat) tersebut, manusia perlu mengorganisasikan diri dalam sebuah negara, yang didalamnya para penduduk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.² Maka tak mengherankan jika kemudian banyak para sarjana Muslim yang merumuskan konsep tentang sebuah negara yang terintegrasi guna mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat.

Salah satu intelektual Muslim yang menyistematiskan gagasan mengenai Islam dan politik, sebagai upaya mewujudkan tujuan kebahagiaan adalah filosof Muslim yang sangat terkenal karena ia dianggap sebagai peletak dasar filsafat Islam yang sistematis, yaitu al-Farabi. Melalui karya monumentalnya *Al-Madinah Al-Fadhilah*, ia mengungkapkan gagasan tentang negara sempurna yang di dalamnya ia juga menyinggung tentang negara yang tidak sempurna yang sedang mencari bentuknya menuju negara sempurna dan konsep pemimpin yang sempurna. Menurut al-Farabi, negara sempurna adalah negara yang di dalamnya masyarakat saling bekerjasama mewujudkan tujuan serta cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.³ Rumusan negara yang

² Muhammad Arif, *Filsafat Politik Islam: Historisitas Dan Aktualisasi (Peran Dan Kontribusi Filsafat Bagi Bangsa)* (Yogyakarta: FA Press, 2014), 4.

³ Ibnu Rusydi and MA, "FILSAFAT POLITIK ISLAM; Sebuah Pengantar," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (December 3, 2015): 110–23,

dirancang oleh al-Farabi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran filosof pendahulunya di Yunani yaitu Platon dan Aristoteles, meskipun konsep Islamnya juga sangat kentara dalam gagasan politiknya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan memaparkan bagaimana konsep negara yang diusung oleh al-Farabi? Bagaimana kontekstualisasi konsep negara al-Farabi dengan sistem politik di Indonesia? Pertanyaan inilah yang diulas secara mendalam artikel ini.

B. Biografi Intelektual Muhammad Iqbal

al-Farabi memiliki nama asli Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Al-Uzalagh al-Farabi. Beliau dilahirkan di Wasij di Distrik Farab (dikenal juga dengan nama Uttar) di Transaxonia pada tahun 257 H/ 870 M. Ayahnya adalah seorang tentara pada masa Dinasti Samaniyah dan merupakan keturunan Persia. Namun demikian, al-Farabi juga berasal dari keturunan Turki sebab ia berbicara bahasa Soghdian, yang merupakan dialek Persia lama juga dialek Turki di rumah dan keluarganya menjunjung tinggi adat-istiadat Turki.⁴

Pada masa mudanya al-Farabi belajar ilmu-ilmu keagamaan dan musik di Bukhara. Ia kemudian meninggalkan Bukhara dan pergi ke Marw. Di sana al-Farabi belajar logika kepada Yuhanna ibn Hailan, seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani. Pada masa Khalifah Al-Mu'tadid (892-902 M), Ibn Hailan dan al-Farabi pergi ke Baghdad. Tak butuh waktu lama, di Bagdad al-Farabi unggul dalam ilmu logika. Ia juga memberikan banyak sumbangsuhnya pada perkembangan filsafat baru dalam bahasa Arab. Pada awal kekhalifahan Al-Muqtadir, al-Farabi dan ibn Hailan meninggalkan Baghdad, tampaknya ia menuju Konstantinopel dan tinggal selama delapan tahun, belajar seluruh silabus filsafat.⁵

Persoalan karier, al-Farabi dikenal sebagai ahli logika. Sehingga ia mendapat julukan sebagai “guru kedua” (Aristoteles sebagai “guru pertama”). Pada saat di Bagdad, al-Farabi memakai waktunya untuk

<https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v2i1.17>; MICHAEL SWEENEY, “GREEK ESSENCE AND ISLAMIC TOLERANCE: AL-FARABI, AL-GHAZALI, IBN RUSH'D,” *The Review of Metaphysics* 65, no. 1 (2011): 41–61; Edi Sumanto, “PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif al-Farabi Dengan Thomas Aquinas),” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (October 17, 2018): 1–12, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1237>.

⁴ Yamani, *Filsafat politik Islam: antara al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Mizan, 2002), 51.

⁵ Ida Ilmiah Mursidin, “PHILOSOPHICAL THOUGHT OF AL-KINDI AND AL-FARABI,” *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (May 20, 2020): 51–66, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.718>.

menulis, mengajar dan mengulas buku-buku filsafat. Mengenai murid-murid al-Farabi yang disebutkan namanya adalah teolog sekaligus filosof Jacobite Yahya ibn 'Adi dan saudaranya Yahya yaitu Ibrahim. Pada tahun 942 M, al-Farabi pergi ke Damaskus dan di sini ia bekerja sebagai tukang kebun di siang hari dan pada malam harinya ia belajar teks-teks filsafat. al-Farabi kemudian menetap di Damaskus hingga wafatnya pada tahun 950 M pada saat usianya sekitar delapan puluh tahun.

al-Farabi meninggalkan karya-karya yang seluruhnya berbahasa Arab. Sebagian besar karangannya terdiri dari karya-karya di bidang teoritis dan ilmu-ilmu praktis, seperti bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Di bidang ilmu-ilmu teoritis, sekitar empat puluh judul karyanya difokuskan pada bidang logika. Di dalamnya ia menulis komentar atas seluruh bagian *Organon*-nya Aristoteles, di samping komentar atas *Isagoge*, karya Porphyry. Di luar itu ia juga menulis risalah-risalah pendek tentang aspek-aspek tertentu logika dan tulisan mengenai hadis Nabi Saw., yang dikumpulkannya untuk menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut menganjurkan seni logika Aristoteles. Di bidang musik karyanya berjudul *Al-Musiqa Al-Kabir*. Karyanya di bidang Metafisika adalah *Fushus Al-Hikam* dan selebihnya mencakup *Al-Jam' bain Ra'yai Al-Hakimain Aflatun Al-Ilahi wa Aristuthalis*. Di bidang astrologi karyanya berjudul *Ahkam Al-Nujum*.

Karya al-Farabi di bidang ilmu-ilmu praktis, terutama di bidang kemasyarakatan terkait politik, di antaranya: *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, *Al-Siyasah Al-Madaniyyah*, *Fushul Al-Madani*, dan *Tahshil Al-Sa'adah*. Karya-karya al-Farabi telah dianggap telah berhasil dalam menyintesis pemikiran filosof Yunani dengan doktrin-doktrin agama Islam.

C. Kondisi Sosio-politik Masa al-Farabi

al-Farabi adalah seorang filsuf Muslim yang berhasil memadukan antara agama dan filsafat. Termasuk dalam hal ini pemikiran politik yang terlihat jelas suatu konsep yang terpengaruh di satu sisi oleh pandangan Platon dan Aristoteles dan doktrin-doktrin agama Islam di sisi lain. Pemikirannya tentang politik bisa dilihat dari karya-karyanya yang termasuk dalam ranah filsafat praktis, meskipun juga banyak beranjak dari filsafat teoritisnya. Salah satu karangannya yang dapat digunakan dalam menelaah pemikiran politiknya yaitu *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Madinah*. Terlihat dengan jelas dalam karya tersebut bahwa al-Farabi tidak hanya mengemukakan tentang politik dan kekuasaan, tetapi lebih

dari itu juga mengungkapkan ranah sosial kemasyarakatan yang tidak bisa dilepaskan dari politik. Dalam mengemukakan gagasannya tersebut, al-Farabi di pengaruhi beberapa faktor kondisi sosial-politik yang melingkupi kehidupan al-Farabi.

al-Farabi lahir pada masa Khalifah Al-Mu'tamid penguasa Dinasti Abbasiyah saat itu. Pada masa ini merupakan periode akhir Dinasti Abbasiyah di mana kekuasaan khalifah mengalami kemunduran, sedangkan yang sesungguhnya berkuasa adalah dinasti-dinasti baru yaitu Turki dan Persia yang berada di batas luar. Pada akhirnya, dinasti-dinasti yang memegang kekuasaan dan khalifah yang berkuasa menjadi boneka di tangan para penguasa dinasti.⁶ Di batas luar, istana para amr satelit, seperti Samaniyyah dan Hamdaniyyah, mendorong kebebasan intelektual dan literer. Kemungkinan al-Farabi melihat contoh Dinasti Samaniyyah awal yang memerintah Transoxania selama hidupnya dengan himpunan bangsa yang multikultural dan multirasial, yang loyal kepada pemerintah pusat yang dalam tulisan politiknya digambarkan sebagai "negara yang baik sekali."⁷

Pada saat itu kekuasaan Dinasti Abbasiyah digoncang oleh berbagai macam gejolak, pertentangan, dan pemberontakan dengan berbagai motif, agama, kesukuan dan kebendaan.⁸ Gejolak dan stabilitas kekuasaan yang kacau, ditambah mengalami beberapa pergantian khalifah di tubuh pemerintahan sehingga mendorong kekhalfahan jatuh dalam jurang kemunduran dan kehancuran. Dalam situasi seperti ini disinyalir membuat al-Farabi berpikir dan merenungkan suatu bentuk negara yang ideal yang di dalamnya seorang pemimpin mampu membimbing kehidupan warganya secara politis dan etis menuju kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barangkali al-Farabi juga terinspirasi oleh sistem kekuasaan pada masa Dinasti Samaniyyah, yang membuat al-Farabi menyebutnya sebagai "negara yang baik sekali".

⁶ Endrika Widdia Putri, "KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF AL-FARABI," *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (August 13, 2018): 95–111.

⁷ *Filsafat politik Islam*, 53.

⁸ Salbiyah Siti, "Etika Politik al-Farabi" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 15.

D. Realitas Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai Keabadian

I. Tentang individu (manusia) dan Masyarakat

Konsep negara ideal yang dirumuskan oleh Farabi berangkat dari gagasannya tentang manusia. “Manusia” tulis al-Farabi, “Termasuk spesies-spesies yang tak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka, ataupun mencapai keadaan terbaik mereka, kecuali melalui asosiasi (perkumpulan) banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama....”.⁹

al-Farabi berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Secara alamiah manusia akan membutuhkan bantuan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga mempunyai tujuan hidup yaitu kebahagiaan yang merupakan kesempurnaan tertinggi hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan dan kesempurnaan hidup dapat dicapai jika manusia mau melebur dalam suatu komunitas (perkumpulan) yang di dalamnya mereka berkumpul, berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai keahliannya. Masing-masing individu menyumbangkan keahlian mereka dalam rangka melengkapi setiap sendi dari sebuah komunitas tersebut. Mereka bahu-membahu dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesempurnaan yaitu kebahagiaan.

Proses interaksi manusia satu dengan manusia yang lain kemudian membentuk suatu komunitas. Komunitas manusia itu ada yang besar, sedang, dan kecil. Komunitas besar terdiri dari berbagai umat dan karakteristik, yang kemudian menjadi satu kesatuan, karena adanya sikap saling pengertian, sehingga muncul tradisi tolong-menolong. Komunitas sedang, hanya terdiri dari satu umat. Sementara komunitas kecil adalah penduduk kota. Ketiga komunitas tersebut merupakan komunitas yang sempurna. Kota adalah bentuk komunitas pertama yang sempurna. Namun, ada juga komunitas yang kurang sempurna, yang tinggal di desa, kompleks, dan rumah. Meskipun demikian, menurut al-Farabi komunitas kurang sempurna memiliki peradaban tersendiri.¹⁰

Pada perkembangannya komunitas-komunitas tersebut akan menjadi lebih besar dan membentuk sebuah organisasi negara, di mana manusia-

⁹ *Filsafat politik Islam*, 60.

¹⁰ Imam Sukardi, “NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN ALFARABI,” *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (December 20, 2017): 286, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.

manusia di dalamnya menjadi warga negara. Pada prosesnya mereka saling bekerja sama memenuhi kebutuhan mereka, setelah itu mereka ingin mencapai tujuan utama, tujuan bersama dalam sebuah negara. Sederhananya, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan utama, manusia perlu bekerjasama dan mengorganisasikan diri dalam sebuah negara.

2. Negara Ideal atau negara Utama al-Farabi

Pemikiran politik al-Farabi yang tertuang dalam konsep negara utama/ideal atau istilah dari al-Farabi sendiri adalah *Al-Madinah Al-Fadhilah* (Kota Utama) nampak dari pernyataan al-Farabi sebagai berikut: “Kota Utama adalah kota yang melalui perkumpulan yang ada di dalamnya bertujuan untuk bekerja sama dalam mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya.”¹¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan pembahasan sebelumnya, berangkat dari titik tolak manusia sebagai makhluk sosial yang kemudian melebur dalam suatu komunitas, yang di dalamnya manusia saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah saling memenuhi kebutuhan hidup, mereka memiliki tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan utama itu adalah cerminan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan di sini mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Meskipun tujuan awal sudah tercapai, perasaan puas, bermanfaat, dan sebagainya. Akan tetapi, masih ada faktor yang kurang yang membuat jiwa mereka merasa tidak tentram. Hal ini yang kemudian menyadarkan mereka untuk menghendaki tujuan lain, sebuah tujuan yang dapat membawa mereka pada ketentraman dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Hal ini oleh al-Farabi digambarkan sebagai proses peralihan tujuan hidup masyarakat di berbagai kota untuk menuju kesempurnaan.

Komunitas itu memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, ada yang besar, menengah, dan kecil. Begitu pun manusia yang di dalamnya juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yang sesuai keahlian masing-masing. Menurut al-Farabi, susunan dari berbagai komunitas dengan ukuran yang berbeda-beda itu, di satu sisi benar-benar menyerupai susunan individu-individu manusia. Sementara, di sisi lain menyerupai susunan segala yang maujud (alam semesta), mulai dari

¹¹ Sukardi, 286.

benda samawi sampai benda-benda yang material. Di mana susunan individu-individu dan alam semesta memiliki keterkaitan yaitu hubungan kerja sama antar anggota komunitas yang berbeda-beda ukuran tersebut. Masing-masing dari mereka melaksanakan fungsinya guna melengkapi dan juga bergantung pada fungsi anggota-anggota yang lain. Seiring dengan hubungan kerja sama tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan satu sama lain, sehingga semuanya memiliki sifat ketergantungan dengan yang lainnya. Ketika para anggota dalam berbagai komunitas tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik, pada gilirannya mereka akan membawa mereka pada kebahagiaan. Oleh karena itu, sudah barang tentu dalam mengatur dan mengoordinasikan setiap kerja dan fungsi dalam berbagai susunan komunitas yang berbeda-beda itu dibutuhkan seorang pemimpin di setiap tingkatan komunitas, sehingga terjalin sebuah kerja sama yang terarah. Dengan demikian, hubungan antarbagian sifatnya tidak saja horisontal atau paralel (sesama individu), tetapi juga bersifat vertikal atau hierarkies (dari tingkat pemimpin sampai yang dipimpin). Semakin tinggi struktur hierarkisnya, semakin luas dan besar pula kekuasaannya dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.¹²

Hubungan kerja sama antar sesama manusia, sebagaimana Platon, oleh al-Farabi diibaratkan seperti fungsi dan mekanisme anggota tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya memiliki fungsi tertentu. Menurutnya bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia adalah kepala, karena melalui kepala (rasio) segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja akal (rasio) dilakukan oleh hati. Begitu juga, al-Farabi mengibaratkan sebuah Negara-Kota bagaikan tubuh manusia yang sehat dan utuh yang selalu bekerja sama untuk kesempurnaan hidup dan kesehatannya.¹³

Dalam tubuh manusia mempunyai sejumlah organ tubuh dengan berbagai fungsi yang berbeda. Ada satu organ yang utama yaitu jantung, dan ada beberapa organ lain yang bekerja sama sesuai peran masing-masing, ini berada di peringkat pertama. Organ di peringkat kedua adalah organ-organ yang bekerja membantu dan melayani organ-organ pendukung jantung. Selanjutnya, ada organ-organ lain yang melayani organ-organ pada peringkat kedua, demikian seterusnya sampai kepada anggota tubuh yang tugasnya anggota tubuh lain tidak dilayani.¹⁴

¹² *Filsafat politik Islam*, 63.

¹³ Abdullah Said, "Filsafat Politik al-Farabi," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 70, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>.

¹⁴ Said, 71.

Teori organis yang dijelaskan oleh al-Farabi di atas, barangkali sejalan dengan pemaparannya tentang cara kerja kota utama dalam mencapai tujuan utama dari kota/negara utama. Seperti dijelaskan sebelumnya, bagaimana anggota tubuh yang paling utama mengendalikan dan mengoordinasikan anggota tubuh yang lainnya untuk bekerja sesuai fungsinya masing-masing, begitupun dalam cara kerja kota/negara utama.

Mekanisme cara kerja kota/negara utama, pertama-tama menurut al-Farabi adalah membagi penduduknya menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kelebihan-kelebihan (bakat dan kemampuan)nya masing-masing. Di antara mereka itu ada seorang kepala (penguasa tertinggi) dan sejumlah penduduk yang masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala. Mereka ini bersama kepala menduduki peringkat pertama. Di bawah mereka ada sekelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga di peringkat pertama, dan kelompok ini berada di peringkat kedua. Kemudian di bawah kelompok kedua, terdapat kelompok yang membantu mereka (kelas atasnya). Dan seterusnya berangsur-angsur menurun sampai pada peringkat terakhir atau terendah yang melayani kelas-kelas yang lain dan mereka sendiri tidak dilayani oleh siapa pun. Dengan demikian, kelompok-kelompok itu akan saling berkaitan dan serasi.¹⁵

Sebagaimana anggota tubuh itu terjadi secara alami, negara/kota utama itu juga sama dengan makhluk alamiah. Pemimpin di kota/negara ini akan seperti Sebab Pertama (Tuhan), yang menjadi sebab bagi adanya makhluk-makhluk atau wujud-wujud yang lain, hingga sampai pada wujud-wujud yang mungkin adanya (mungkin al-wujud) yaitu materi pertama dan elemen-elemennya yang tak memiliki elemen yang menguasai, namun diperintah dan selalu eksis demi yang lainnya.¹⁶

Peran pemimpin atau penguasa dalam negara/kota utama sangat sentral, mengingat untuk mengelola kota sedemikian rupa hingga semua bagian kota saling berkaitan, teratur dan serasi dalam bekerja sama untuk menyingkirkan segala keburukan dan untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Jadi, semua warga negara/kota saling bersinergi untuk mencapai tujuan utama (kebahagiaan sejati). Kebahagiaan itu akan dapat dicapai

¹⁵ *Filsafat politik Islam*, 65.

¹⁶ 66.

dengan lenyapnya keburukan-keburukan yang muncul dalam kota/negara tersebut, serta mereka memperoleh kebaikan-kebaikan. Peran penguasa dalam hal ini tentu penting dalam mendidik dan menyempurnakan semua warga negara, yang pada akhirnya mereka semua mampu menguasai pengetahuan teoritis sehingga dapat menjalani kehidupan kontemplatif dan filosofis, yang merupakan tujuan utama dari negara/kota utama.¹⁷ Meskipun tidak semuanya menguasai hal-hal semacam ini.

Dengan demikian, jelas negara/kota utama dalam pandangan al-Farabi adalah sebuah negara yang di dalamnya penduduk saling bekerja sama, menyumbangkan kemampuan dan keahliannya masing-masing guna meraih tujuan bersama yaitu kebahagiaan sesungguhnya. Peran pemimpin juga tidak bisa diabaikan, sebab fungsi pemimpin adalah yang mampu mengarahkan dan membawa warganya menuju tujuan utama. Demikian, hingga klasifikasi pemimpin dalam negara/kota utama sangat penting dan setidaknya sulit untuk menemukan seorang pemimpin yang mampu memimpin negara/kota utama. Namun, bukan berarti tidak mungkin.

3. Tentang Pemimpin Negara Ideal

Salah satu unsur sentral suatu negara dapat dikatakan ideal adalah melalui pemimpinnya. Memaparkan negara/kota ideal dalam pandangan al-Farabi tanpa menjelaskan konsep kepemimpinannya tentu tidaklah lengkap.

Dalam mencapai tujuan utama (kebahagiaan sejati) dari negara ideal, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mengarahkan semua warganya menuju jalan kebahagiaan. Sebab tidak semua warga mengetahui kebahagiaan sebagai tujuan untuk dirinya sendiri maupun tujuan utama dalam negara, atau bahkan tidak mengetahui cara meraih kebahagiaan tersebut. Sebagian besar, pada kenyataannya sangat membutuhkan. Meskipun seseorang mengetahui kebahagiaan dan cara mencapainya, baik ia tahu sendiri atau mengetahui karena memiliki pengetahuan dan bimbingan dari seorang guru, belum tentu ia akan berbuat menurut pengetahuannya, kalau tidak ada rangsangan dari luar. Jadi, ia membutuhkan orang yang membuatnya berbuat demikian.¹⁸

¹⁷ Azizah Aryati, "FILSAFAT DI DUNIA TIMUR: PEMIKIRAN AL-KINDI DAN AL-FARABI," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 4, no. 1 (May 10, 2015): 49–60, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i1.1548>.

¹⁸ Muhammad Syafi'i, "ETIKA DALAM PANDANGAN AL-FARABI," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (January 31, 2018): 139–60, <https://doi.org/10.18592/jiu.v16i2.1522>.

Dalam memimpin orang lain, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati orang lain. Ada yang hanya memiliki salah satunya dan ada yang memiliki kedua kemampuan tersebut. Menurut al-Farabi ada 3 golongan manusia dari segi kapasitasnya untuk memimpin, yaitu: *Pertama*, manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati (penguasa sepenuhnya, tanpa kualifikasi); *Kedua*, manusia yang berperan sebagai manusia yang memimpin sekaligus dipimpin; *Ketiga*, manusia yang dikuasai sepenuhnya.¹⁹

Seorang pemimpin negara utama tidak bisa dipegang oleh sembarang orang, maka dalam diri seorang pemimpin negara utama harus memiliki dua hal. *Pertama*, fitrah dan tabiat. *Kedua*, talenta dan kehendak.²⁰ Selain memiliki fitrah atau naluri alamiah sifat-sifat kepemimpinan di dalam dirinya, seorang pemimpin juga harus mempunyai bakat dan pengetahuan soal kepemimpinan, memahami seluk-beluk sistem kepemimpinan, dan sebagainya.

Secara lebih jelas, pemimpin tertinggi di negara utama adalah mereka yang memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan. Ia mampu memahami dengan baik tindakan apa yang harus dilakukan. Ia mampu membimbing orang lain untuk melakukan apa yang diperintakkannya. Mampu mengatur sistem pemerintahannya dengan memanfaatkan potensi orang-orang yang memiliki keahlian. Ia mampu menentukan, mendefinisikan, dan mengarahkan tindakan-tindakannya menuju kebahagiaan. Semua kemampuan itulah yang terdapat pada seorang pemimpin yang memiliki fitrah yang bisa berkembang dengan baik, apabila jiwanya bersatu dengan akal aktif. Ini yang disebut sebagai penguasa sejati dan dia dikatakan menerima wahyu, pemerintahannya adalah pemerintahan yang tertinggi, pemerintahan yang lain berkedudukan di bawahnya dan berasal darinya. Dengan demikian, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, yang dimaksud penguasa tertinggi adalah nabi atau imam. Nabi atau imam adalah pemberi hukum, segala keputusan dan tindakan kepemimpinannya didasarkan pada wahyu dari Tuhan.²¹

¹⁹ Puji Kurniawan, "MASYARAKAT DAN NEGARA MENURUT AL-FARABI," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (July 1, 2018): III, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830>.

²⁰ Said, "Filsafat Politik al-Farabi," 72.

²¹ *Filsafat politik Islam*, 61–62.

Menurut al-Farabi, kriteria pemimpin negara utama harus memenuhi 12 (dua belas) kualitas luhur, yaitu:²² 1) Lengkap anggota badannya; 2) Baik intelegensinya dan mudah dimengerti; 3) Mutu intelektualitasnya; 4) Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti; 5) Pecinta pendidikan dan gemar mengajar; 6) Tidak loba dalam hal makanan, minuman, maupun wanita; 7) mencintai kejujuran dan kebenaran; 8) Berbudi luhur; 9) Tidak mengutamakan keduniaan; 10) Bersifat adil; 11) Optimisme dan besar hati; 12) Kuat pendirian, penuh keberanian, antusiasme dan tidak berjiwa kerdil. al-Farabi menambahkan satu kriteria yang bercorak sufistik, yaitu pemimpin negara harus mampu naik pada dataran akal fa'al (akal aktif) yang darinya wahyu dan ilham dapat diambil.

Pemimpin di negara utama tidak mempunyai ketertarikan pada hal-hal yang bersifat materi. Artinya, ia sudah sampai pada tingkatan akal mustafad yang mampu berkomunikasi dengan akal aktif. Fokusnya hanya pada tujuan utama, yaitu mengabdikan kepada Sebab Pertama, tunduk kepada-Nya dan mencukupkan diri hidup untuk-Nya. Penguasa-penguasa dibawahnya dan masyarakat mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan utama.²³

Sosok yang dapat mewakili dan yang memang harus berada di negara utama adalah yang memenuhi 12 kualitas luhur ditambah ia seorang nabi atau filsuf, karena keduanya berhubungan dengan akal aktif dan mampu mengarahkan pada kebahagiaan. Bagi al-Farabi, masyarakat yang dipimpin oleh seorang nabi adalah masyarakat yang utama dan bahagia, bahkan seakan-akan masyarakat itu sendiri akan berpotensi menjadi penguasa-penguasa utama. Namun, menemukan sosok yang menggambarkan kriteria seperti seorang nabi tidaklah mudah, sebab sosok seperti nabi hanya ada pada masa tertentu. Maka, harus ada aturan yang lebih lunak untuk menentukan kriteria pemimpin utama. Hal ini dikarenakan tidak semua orang memenuhi semua persyaratan, namun jika ada yang mampu memenuhi sebagian besar persyaratan yang ada, ia bisa menjadi pemimpin terbaik kedua. Apabila tidak ada yang bisa menjadi pemimpin terbaik kedua, maka sekelompok orang yang bersama-sama memenuhi semua persyaratan dapat menjadi penguasa. Jika tidak ditemukan lagi, maka seorang atau dua orang filosof atau lebih yang mampu mengikuti, menafsirkan, mengembangkan, dan

²² Said, "Filsafat Politik al-Farabi," 73.

²³ Moh. Asy'ari Muthhar, "Kontekstualisasi Filsafat Politik Al-Fârâbî Dalam Pemikiran Politik Modern," *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (September 1, 2016): 42, <https://doi.org/10.36835/maraji.v3il.61>.

menerapkan hukum dan adat yang telah dimapankan oleh penguasa (utama) sebelumnya, sesuai dengan situasi yang baru, ia dapat diangkat menjadi penguasa.²⁴

Pemimpin negara utama dalam menjalankan roda pemerintahannya mempunyai dua tugas, yaitu: pengajaran dan pembentukan karakter. Seorang pemimpin harus menguasai ilmu dan pengetahuan yang luas, sehingga mampu membimbing rakyatnya berakhlak yang baik dan beradab.

4. Klasifikasi Negara Tidak Ideal

Untuk mampu memahami bentuk negara/kota ideal yang digagas oleh al-Farabi akan dijabarkan bentuk-bentuk negara yang berlawanan dengan negara/kota ideal. Negara-negara yang berlawanan tersebut dengan corak kepemimpinan yang ada, sejatinya sedang mencari bentuk menuju negara/kota utama, namun ada banyak kekurangan dan kendala di dalamnya.

Kota/Negara Bodoh (al-madinah al-jahiliyyah), negara bodoh adalah negara yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka apa kebahagiaan itu. Jika mereka dibimbing ke sana, mereka tidak memahaminya dan tidak mempercayainya.²⁵ Hal-hal baik yang mereka kenali hanyalah hal-hal yang secara superfisial dianggap sebagai baik di antara apa yang dianggap sebagai tujuan-tujuan hidup, seperti kesehatan tubuh, kemakmuran, menikmati kesenangan-kesenangan (badani), kebebasan untuk memenuhi nafsu-nafsu, dan diperlakukan dengan penuh hormat dan kebebasan. Hal-hal yang bertentangan dengan ini adalah kesedihan, seperti kelemahan tubuh, kemiskinan, ketiadaan penikmatan kesenangan-kesenangan, ketiadaan kebebasan untuk mengikuti nafsu-nafsu, dan tidak diperlakukan dengan penuh kehormatan dan kebesaran.²⁶ Jadi, bagi warga negara bodoh segala yang membawa kesenangan hawa nafsu adalah kebahagiaan, dan segala yang menghalangi atau membatasi pada kesenangan hawa nafsu adalah kesengsaraan yang harus dihindari.

Secara lebih detail negara bodoh dibagi menjadi enam macam kota/negara²⁷, di antaranya sebagai berikut : (1) Kota/negara kebutuhan

²⁴ *Filsafat politik Islam*, 64.

²⁵ Abu Nashr al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (Kairo: Hindawi, 2012), 77.

²⁶ *Filsafat politik Islam*, 68.

²⁷ al-Farabi, *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, 88.

dasar (*al-madinah al-dharuriyyah*) yakni, suatu kota yang di dalamnya para warga memprioritaskan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan badan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Mereka saling bekerjasama untuk memperolehnya. (2) Kota/negara jahat (*al-madinah al-nadzalah*) yakni, suatu kota yang para warganya bekerja sama untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan secara berlebih-lebihan sebagai tujuan hidup dan tidak mau membelanjakannya kecuali untuk kebutuhan badani. (3) Kota/negara rendah (*al-madinah al-khassah*) yakni, suatu kota yang hanya yang warganya mementingkan kenikmatan makanan, minuman, dan menikah (seks). Semua kenikmatan itu bukan untuk kelangsungan hidup, melainkan sebagai hiburan. (4) Kota/negara kehormatan (*al-madinah al-karamiyah*) yakni, kota yang para warganya bertujuan untuk meraih kehormatan dan pujian di antara bangsa-bangsa, untuk dimuliakan dengan kata-kata dan perbuatan, memiliki kebanggaan dan kemegahan, baik di mata orang lain maupun di antara mereka sendiri. Ini juga dinamakan sebagai negara timokrasi. (5) Kota/negara despotik (*al-madinah al-taghallub*) yakni, kota yang tujuan warganya adalah untuk berkuasa atas orang lain dan mencegah atau menahan diri agar tidak ditundukkan oleh orang lain. Mereka terus berusaha mengalahkan orang lain. Para warga di kota ini cinta kekuasaan. (6) Kota/negara demokratik (*al-madinah al-jama'iyah*) yakni, Kota yang warganya menghendaki kebebasan, setiap dari mereka melakukan apapun yang mereka kehendaki tanpa ada yang menghalangi keinginannya sama sekali. Dari kota ini, menurut al-Farabi tidak menutup kemungkinan akan ditemukan tipe kota utama, sebagai kota terbaik yang dihasilkan oleh berbagai tipe masyarakat yang ada.²⁸ Kota demokratik ini dianggap paling baik di antara kota-kota di negara bodoh.

Selain negara bodoh adapula *Kota/Negara Fasik (al-madinah al-fasiqah)*, yaitu negara yang para warganya memahami apa itu kebahagiaan, tentang Tuhan, serta mengerti tindakan-tindakan yang membawa pada kebahagiaan itu sebagaimana warga utama. Namun, dalam perwujudan kebahagiaan itu mereka justru bertolak dari pandangannya dan berperilaku dan hidup sebagaimana warga negara bodoh.²⁹ Jadi, mereka sebenarnya mengetahui sesuatu yang baik, keyakinan mereka sama dengan negara utama, namun dalam praktiknya mereka lebih memilih berbuat seperti warga negara jahiliyah. Lalu, ada *Kota/Negara yang Berubah (al-madinah al-mubaddilah)*, merupakan kota yang beralih. Pada awalnya pandangan dan perbuatan penduduknya sama

²⁸ Sukardi, "NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN ALFARABI," 298.

²⁹ Said, "Filsafat Politik al-Farabi," 74.

dengan pandangan dan perbuatan masyarakat negara utama. Kemudian, karena pengaruh pandangan lain, kota ini menyeleweng dari pandangan semula.³⁰ Perubahan pandangan dan perbuatan di kota ini justru berubah ke arah yang tidak baik, alih-alih ke arah yang lebih baik dari pandangan semula. Terakhir, ada *Kota/Negara Sesat (al-madinah al-dhalalah)*, para warga di kota ini sesungguhnya menghendaki kebahagiaan sejati di akhirat, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang keliru mengenai hal-hal yang dapat membawa mereka pada kebahagiaan sejati itu. Pemimpin utama mereka (bisa jadi) adalah seorang yang berpura-pura menerima wahyu dan kemudian menciptakan kesan yang salah seperti lewat pemalsuan, penipuan, dan pengelabuan.³¹

E. Kontekstualisasi Konsep Negara al-Farabi di Indonesia

Jika dikontekstualisasikan dalam bentuk negara Indonesia, dapat dilihat bahwa filsafat politik al-Farabi mengandung konsep sosial dan politik. Konsep sosial ini berkaitan dengan tujuan kebahagiaan, karena untuk mencapai kebahagiaan hanya dapat diaktualisasikan dalam sosial kemasyarakatan, melalui kerjasama, solidaritas, gotong-royong. Dengan begitu bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai oleh seorang individu. Untuk dapat bekerjasama meraih tujuan kebahagiaan, maka masyarakat perlu mengorganisasikan diri dalam sebuah negara, inilah konsep politik. Sehingga sistem pembagian tugas dan peran dalam masyarakat menjadi lebih teratur dan terarah.

Sebagaimana konsep negara al-Farabi, terbentuknya negara Indonesia yang sekarang ini tidak lepas dari faktor sosial kemasyarakatan. Sebelum menemukan bentuk negara yang sekarang, Indonesia adalah sebuah kondisi yang terbagi dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan. Selain itu, Indonesia juga mengalami penderitaan kolonialisme, di mana kekuasaan asing atau dari luar menguasai dan menindas rakyat. Peristiwa kelam kolonialisme ini kemudian membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melawan hegemoni dan dominasi para penjajah. Dalam upayanya tersebut seluruh komponen masyarakat berbondong-bondong, bergotong-royong, bekerjasama, menyumbangkan keahlian mereka masing-masing dalam menyusun strategi mengusir penjajah dari bumi nusantara dan untuk mewujudkan tujuan bersama mencapai kemerdekaan (kebebasan) dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan saat ini

³⁰ Said, 75.

³¹ *Filsafat politik Islam*, 64.

dimaknai dengan memperoleh kemerdekaan. Dengan demikian solidaritas diantara masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan saat itu mengantarkan pada pembentukan negara Indonesia.

Pada masa sekarang, bukan lagi kerjasama dalam hal meraih kemerdekaan seperti pada masa penjajahan. Namun, masyarakat harus bahu-membahu dan bergotong-royong dalam memenuhi kebutuhan dalam berbagai lini kehidupan dan menyumbangkan peran sesuai keahlian masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, gotong-royong sudah menjadi tradisi yang mengakar dan mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Sehingga sebagaimana dalam pandangan al-Farabi untuk menuju dan mencapai kebahagiaan, solidaritas masyarakat Indonesia dalam sosial kemasyarakatan sudah terpenuhi, meskipun indikator kebahagiaan sejati sebagaimana yang al-Farabi dambakan masih belum tercapai.

Konsep utama dari filsafat politik al-Farabi adalah gagasan negara utama dengan kualifikasi yang sangat sempurna. Negara Indonesia jika dihadapkan dengan negara utama, dapat dikatakan jauh dari kualifikasi negara utamanya al-Farabi. Terutama mengenai kualifikasi pemimpin dari negara utama yang setara atau seperti nabi atau paling tidak seorang filosof. Jika dengan negara utama, kualifikasi bentuk negara Indonesia masih jauh, kemungkinan Indonesia termasuk dalam kelompok negara tidak idealnya al-Farabi. Disejajarkan dengan negara-negara tidak ideal, negara Indonesia termasuk dan mungkin lebih tepat sama dengan karakteristik dari negara demokratik/*al-madinah al-jama'iyah* (bagian dari negara bodoh) yang digambarkan oleh al-Farabi. Negara demokratik adalah yang warganya menghendaki kebebasan, setiap dari mereka melakukan apapun yang mereka kehendaki tanpa ada yang menghalangi keinginannya sama sekali. Negara demokratik dalam pengertian al-Farabi adalah sebagai berikut:

“Negara demokratik adalah negara yang setiap penduduknya mendapatkan keleluasaan dan dibiarkan melakukan apapun yang dikehendakinya...Penduduknya leluasa melakukan apapun yang dikehendakinya...Segenap upaya keras dan tujuan kota-kota jahiliah ada dalam kota seperti ini dengan cara yang sangat sempurna. Di antara semua (kota-kota jahiliah) itu, inilah kota yang paling terpuji dan bahagia. Secara lahiriah, ia seperti pakaian yang bersulam, yang penuh dengan celupan dan bentuk-bentuk warna-warni. Semua orang menyukainya dan suka tinggal di dalamnya, karena semua kehendak atau

keinginan manusia akan dipenuhi oleh kota ini. berbagai bangsa bermigrasi ke kota ini untuk mukim dan kota ini pun lalu tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Orang dari segala ras memadati kota ini, dan melalui perkawinan melahirkan anak-anak yang kecenderungan mereka sangat beragam, dan dengan pendidikan serta proses pendewasaan sangat beragam pula.”³²

Dalam konteks inilah al-Farabi menyebutkan bahwa lama-kelamaan dapat bermunculan orang-orang bijak di kota seperti ini. Bagi al-Farabi kota seperti ini memiliki kebaikan maupun keburukan yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota jahiliyyah lainnya. Semakin besar, semakin berperadaban, semakin padat penduduknya, semakin produktif, dan semakin sempurna kota ini, semakin besar pula kebaikan dan keburukan yang ada di kota ini.

Karakteristik negara demokratik sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan hampir sama dengan gagasan sistem negara demokrasi modern, meskipun tidak identik. Berdasarkan uraian di atas, sistem negara Indonesia juga mendekati sistem negara demokratik. Secara lebih jelas persamaan negara demokratik al-Farabi dengan sistem demokrasi Indonesia dapat dilihat dari konsep demokrasi pancasila yang mendasari jalannya sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan, gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Lebih lanjut, dapat ditelusuri lewat prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu adanya kebebasan dan persamaan, sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil bagi usaha pengembangan diri setiap masyarakat dan setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. Adanya kedaulatan rakyat juga menjadi prinsip demokrasi pancasila, di mana kebijakan dibuat berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat terjaminnya kepentingan rakyat. Prinsip selanjutnya tentu adalah adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Jika dibandingkan dengan negara demokratiknya al-Farabi, dalam kenyataan dinamika sistem demokrasi Indonesia dapat dikatakan hampir sama. Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam mewujudkan keinginan apalagi ditambah dengan tersedianya sarana penunjangnya

³² 75.

dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Lalu sistem pengambilan kebijakan didasarkan atas dan untuk kepentingan rakyat. Jadi sama dengan negara demokratik al-Farabi dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan sarana bagi terpenuhi keinginan dari rakyat, lama-kelamaan dapat memunculkan manusia-manusia bijak. Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan dalam sistem demokrasi pancasila bukanlah kebebasan yang mutlak yang dapat melanggar hak orang lain, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang diselaraskan dengan tanggungjawab sosial.

Penggambaran al-Farabi selanjutnya tentang negara demokratik bahwa meskipun ini termasuk negara bahagia dan terpuji daripada negara-negara bodoh lainnya, negara ini memiliki kelemahan yaitu semakin bereperadaban dan maju maka keburukan dan kebaikan juga semakin tinggi. Dikontekstualisasikan dengan negara Indonesia hal ini juga sesuai. Dalam kenyataannya, semakin maju dan berkembangnya negara Indonesia dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, hankam, sosbud) dimensi kebaikan dan keburukan juga meningkat. Kebaikannya adalah segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan dinamika kehidupan masyarakat dapat terarah, juga munculnya orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga kemungkinan dapat tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun, tak dapat dipungkiri keburukan-keburukan juga turut mewarnai. Muncul manusia-manusia serakah yang melakukan tindak pidana korupsi, adanya praktik suap-menyuap dalam mendapatkan pelayanan publik, di sisi lain kemiskinan belum tertuntaskan, tindak kriminalitas juga masih merajalela.

Dengan demikian pemerintah belum mampu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Sehingga tidak termasuk dalam kategori kebahagiaan dalam negara utama. Padahal dalam negara utama indikator kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan materi, namun kebutuhan tersebut pasti terpenuhi. Sedangkan jika melihat negara Indonesia pemenuhan kebutuhan materi masih belum menyeluruh dan merata, terbukti dengan adanya kemiskinan, apalagi di era pandemi saat ini, banyak bidang yang terdampak.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya artikel ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, al-Farabi menuangkan gagasan politiknya dengan konsep negara utama. Manusia memiliki tujuan dalam kehidupannya, yaitu

kebahagiaan. Untuk mewujudkan itu, manusia perlu mengorganisasikan diri dalam sebuah negara, yang didalamnya para penduduk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep utama dalam filsafat politik adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (negara utama), di mana masyarakat di dalamnya saling bekerja sama, bergotong royong menyumbangkan kemampuan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama dan mencapai tujuan kebahagiaan. al-Farabi juga mengemukakan negara-negara yang berlawanan dengan negara utama. al-Farabi juga melengkapi konsep negara ini dengan konsep pemimpin negara, tentu klasifikasi pemimpin dalam negara utama. Sosok yang dapat mewakili dan yang memang harus berada di negara utama seorang nabi atau filsuf, karena keduanya berhubungan dengan akal aktif dan mampu mengarahkan pada kebahagiaan. Pemimpin di negara utama ini harus memiliki pengetahuan yang luas, karena ia yang akan mengarahkan dan membimbing warganya menuju tujuan kebahagiaan.

Kedua, Konsep negara al-Farabi jika dikontekstualisasikan dengan Indonesia, memang tidak begitu tepat. Namun, berangkat dari teorinya al-Farabi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang membudayakan gotong-royong dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Negara Indonesia dalam klasifikasi negaranya al-Farabi dapat disejajarkan dengan negara demokratisnya al-Farabi, yaitu ada beberapa persamaan dengan sistem demokrasi pancasila yang menjadi sistem ketatanegaraan Indonesia. Inilah nilai dari konsep negara yang digagas al-Farabi itu yang relevan dengan sistem politik di Indonesia

Daftar Pustaka

- al-Farabi, Abu Nashr. *'Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*. Kairo: Hindawi, 2012.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Politik Islam: Historisitas Dan Aktualisasi (Peran Dan Kontribusi Filsafat Bagi Bangsa)*. Yogyakarta: FA Press, 2014.
- . “Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (December 22, 2017): 215–36. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-02>.
- Aryati, Azizah. “FILSAFAT DI DUNIA TIMUR: PEMIKIRAN AL-KINDI DAN AL-FARABI.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 4, no. 1 (May 10, 2015): 49–60. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i1.1548>.

- Kurniawan, Puji. "MASYARAKAT DAN NEGARA MENURUT AL-FARABI." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (July 1, 2018): 101–15. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4il.1830>.
- Mursidin, Ida Ilmiah. "PHILOSOPHICAL THOUGHT OF AL-KINDI AND AL-FARABI." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (May 20, 2020): 51–66. <https://doi.org/10.30863/jad.v3il.718>.
- Muthhar, Moh. Asy'ari. "Kontekstualisasi Filsafat Politik Al-Fârâbî Dalam Pemikiran Politik Modern." *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (September 1, 2016): 28–54. <https://doi.org/10.36835/maraji.v3il.61>.
- Putri, Endrika Widdia. "KONSEP KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF AL-FARABI." *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (August 13, 2018): 95–111.
- Rusydi, Ibnu, and MA. "FILSAFAT POLITIK ISLAM; Sebuah Pengantar." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (December 3, 2015): 110–23. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v2il.17>.
- Said, Abdullah. "Filsafat Politik al-Farabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (September 14, 2019): 63–78. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1il.4097>.
- Siti, Salbiyah. "Etika Politik al-Farabi." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sukardi, Imam. "NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (December 20, 2017): 283. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.
- Sumanto, Edi. "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (October 17, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1237>.
- SWEENEY, MICHAEL. "GREEK ESSENCE AND ISLAMIC TOLERANCE: AL-FARABI, AL-GHAZALI, IBN RUSH'D." *The Review of Metaphysics* 65, no. 1 (2011): 41–61.
- Syafi'i, Muhammad. "ETIKA DALAM PANDANGAN AL-FARABI." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (January 31, 2018): 139–60. <https://doi.org/10.18592/jiu.v16i2.1522>.
- Yamani. *Filsafat politik Islam: antara al-Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan, 2002.

Konsep Negara dalam Filsafat Politik Al-Farabi dan Kontekstualisasinya di Indonesia